

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah. Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Desa mendapatkan kewenangannya dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Dalam Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang –Undang desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, Bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).>juklabbimkonkeudesa diakses tanggal 11 Januari tahun 2018 jam 21.00).

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terdepan dalam pelaksanaan keuangan desa, maka diperlukan adanya kapasitas perangkat desa yang memadai. Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa. ([www.repost.ipb.ac.id](http://www.repost.ipb.ac.id) diakses pada tanggal 24 Mei 2018 pukul 21.30)

Landasan mengenai pemerintahan desa merupakan keanekaragaman, partisipasi demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. tidak hanya berupa hal tersebut saja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa maka setiap aparat pemerintah desa harus memahami hak dan kewajiban masyarakat, harus

memahami terlebih dahulu bagaimana hak desa dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaanya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus mengedepankan Efektivitas. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) “efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang di capai”. efektivitas di sini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi di kaitkan dengan efektivitas maka terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Dari efektivitas harus menjadikan suatu gambaran suatu desa yang hendak ditarget dalam pengelolaan keuangan. Efektivitas dalam memajukan pemerintahan desa, dapat dilihat pada berbagai kegiatan pelatihan ketatausahaan pada lembaga pemerintah desa tersebut agar pelayanan terhadap masyarakat lancar, profesional, cepat dan tepat diperlukan kinerja yang efektif.

Tujuan utama dari perkembangan administrasi dalam mengelola keuangan melalui efektivitas adalah bagaimana upaya suatu instansi dalam meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan yang baik dan tepat guna bagi masyarakat, khususnya aparatur pemerintah agar lebih handal, professional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta bagaimana menyikapi dinamika proses perubahan lingkungan yang strategis yang bermutu dan mempunyai nilai positif dalam memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan pelayanan maupun dalam tata pengelolaan keuangan desa.

Perhatian pemerintah ini pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kebutuhan pembangunan dewasa ini dimana aparat sebagai unsur aparatur negara harus memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan yang akan muncul dalam proses pembangunan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi dasar dan tujuan dari pemerintah desa dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa ini masih minim pengawasan dan kurangnya penataan terhadap penggunaan anggaran. fakta lapangan menunjukan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur reguler.

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa hal yang tercantum berupa dana desa, itu sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Tentang Desa pasal 1 ayat (8) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam (www.keuandangesa. com diakses tanggal 11 Januari tahun 2018 jam 21.00)

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 1, ayat 2 Dana desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pembangunan. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dana desa itu di tujukan demi kemajuan dari desa yang mendapatkan dana desa. Pada tahun 2016 setiap desa mendapatkan dana desa tersebut sebesar Rp. 602.000.000, dimana pengalokasian dana desa tersebut terbagi kedalam dua tahapan pencairan tahap pertama yakni 60 % dan sisanya pada pencairan tahap kedua yakni 40%.



sumber : [www.bpkp.juklasbimkeudes.com](http://www.bpkp.juklasbimkeudes.com) diakses tanggal 11 januari 2018 pukul 21.00.

Siklus Menyatakan bahwa Proses Pengelolaan keuangan Desa merupakan suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan dalam kehidupan. dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,” diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik, pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa”.

Pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa tersebut, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan, Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Tercemin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) karena tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggaran terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 4 mengatakan bahwa pengaturan desa tersebut bertujuan membentuk pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta tanggung jawab. mengenai pengaturan tersebut untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya aparat pemerintahan yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Maksud profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparat pemerintah desa dalam profesionalisme aparatur pada prinsip nya mengandung 2 makna yakni:

Pertama, profesi aparatur diuntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat di andalkan sebagai penunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas. Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Profesional diatas dinyatakan bahwa aparat pemerintahan desa harus mencerminkan sikap dan tindakan aparat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi nya supaya berjalan efektif dan harus mencerminkan aspek tingkah laku untuk aparat pemerintahan desa dalam melayani masyarakat. oleh karenanya aparat pemerintahan desa diuntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.

Indikator bahwa tidak profesional dari aparat pemerintahan desa bisa dilihat dari kemampuan, keterampilan, keahlian dan pengabdian. Bahwa dilihat dari segi kemampuan, keterampilan, dan keahlian adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan pengabdian bisa dilihat dari sikap dan tindakan dari aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Konsep ini, berlaku untuk setiap desa yang ada di Indonesia termasuk, Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan dua point tersebut bisa dinyatakan bahwa hasil praduga sementara yang ditemukan di Desa Sukarame masalah pertama, kurang profesionalisme nya aparat pemerintahan mengenai sikap dan tindakan aparatur dalam memberikan pelayanan. dan mengenai hal tindakan aparat pemerintahan desa berbelit-belit dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. masalah kedua, sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 4 bahwa aparat pemerintah harus terbuka dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya. Namun praduga sementara yang ditemukan di Desa Sukarame masih kurang nya transparansi oleh aparat pemerintahan desa kepada masyarakat mengenai hal pengelolaan keuangan desa hal ini berdasarkan yang ditemukan di lapangan. Masalah ketiga, berupa belum kritis nya masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa khusus nya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan hasil praduga sementara dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program



kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan memformulasikan judul: **Efektivitas Aparat Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016.**

## **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Kurang profesionalisme aparat pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Aparat pemerintah masih kurang transparansi terhadap masyarakat khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Masyarakat belum kritis terhadap proses pengelolaan keuangan desa khususnya dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

4. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka di rumuskan masalah pada kantor desa sukarama kabupaten Tasikmalaya yaitu

1. Bagaimana Proses Aparat Pemerintah Desa Sukarama dalam menjalankan pengelolaan keuangan Desa Sukarama, Kecamatan Sukarama, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana Faktor pendorong dan penghambat dari Efektivitas Aparat Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sukarama Kecamatan Sukarama Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan untuk mendorong dan meminimalisir hambatan dari Efektivitas Aparat Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sukarama Kecamatan Sukarama Kabupaten Tasikmalaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses aparat pemerintah dalam menjalankan Pengelolaan Keuangan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor pendorong dan penghambat dari Efektivitas Aparat Pemerintahan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mendorong dan meminimalisir hambatan dari Efektivitas Aparat Pemerintahan dalam Pengelolaan keuangan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Memperoleh gambaran langsung terkait efektivitas aparat pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dibidang Adminitrasi dalam hal efektivitas aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan Desa Sukarame kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Untuk Peneliti**

Untuk menegetahui secara lebih mendalam mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Sukarame Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, apakah Pengelolaan Keuangan Desa tersebut sudah sesuai dengan Pengelolaan Keuangan berdasarkan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **b. Untuk Instansi**

Sebagai bahan masukan untuk memahami terkait Pengelolaan Keuangan Desa Sukarame khususnya dari pemerintah pusat yang di peruntukan bagi desa, serta sebagai bahan evaluasi mengenai Aparat Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sukarame itu sendiri.

### **c. Untuk Peneliti Selanjutnya**

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

### C. Kerangka Pemikiran

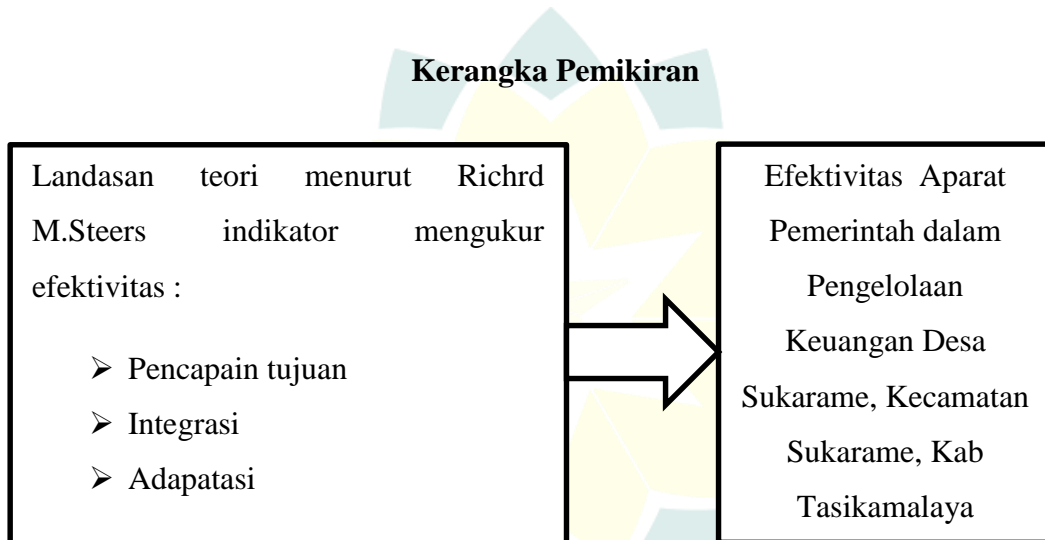
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi tersebut. bahwa efektivitas menjadi salah satu dasar pembentukan dan penyelenggaraan instansi pemerintahan oleh karenanya eksistensi dan pertumbuhan sangat diperlukan.

Pembahasan selanjutnya Tentang aparat pemerintah desa, aparat atau aparatur merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu lembaga pemerintahan khususnya dalam menjalankan pemerintahan desa, aparat pemerintahan desa adalah orang atau sekelompok orang yang menjalankan sebuah lembaga yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

Pengertian Keuangan Desa dapat disimpulkan bahwa keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik sementara Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sementara itu dalam penelitian ini indikator efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh teori Richard M. Steers yaitu efektivitas berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

**Gambar 2.1**



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas bahwa indikator-indikator menurut Richrd M.steers di jelaskan sebagai berikut: Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses.. Pencapain tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus, Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.